

BAB 1

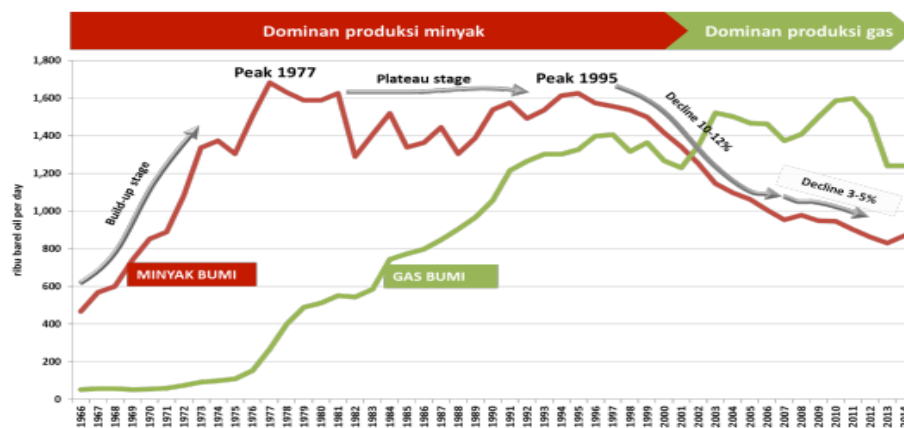
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini topik yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat luas adalah dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM menjadi hal krusial bagi suatu negara tak terkecuali oleh Negara Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM seakan menjadi isu yang sangat sensitif, pasar akan merespon negatif akibat kenaikan harga BBM dengan menaikkan harga pada barang kebutuhan pokok. Akibat dari kenaikan harga BBM yang relatif tinggi menyebabkan guncangan pasar yang cukup dalam bagi perekonomian Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, kenaikan harga BBM menjadi hal krusial karena banyak masyarakat yang masih menggantungkan faktor penggerak ekonomi utamanya pada sektor BBM.

Indonesia tercatat sebagai salah satu dari sekian negara yang memiliki cadangan minyak yang cukup besar. Ini dibuktikan dengan produksi minyak Indonesia yang pernah menyentuh 1.68 juta barel/hari pada tahun 1977 dan 1.62/hari juta barel 1979. Akan tetapi hal ini tidak bertahan, setelah tahun 1995 produksi minyak Indonesia rata-rata menurun dengan *natural decline rate* sekitar 12% per tahun.¹

¹ *Rencana Strategis 2015-2019*, tercantum dalam <http://migas.esdm.go.id>. diakses pada tanggal 18 Febuari 2018 jan 12.30.



Sumber : migas.esdm.go.id 2014

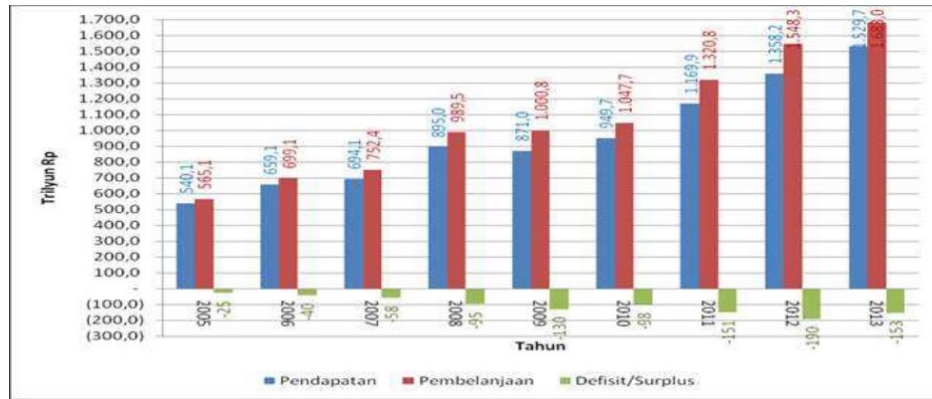
Gambar 1.1.Statistik produksi minyak tahun 1996-2015.

Produksi minyak yang terus menerus mengalami penurunan membuat Indonesia tak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat setiap tahunnya akibat dari meningkatnya volume ekonomi dalam negeri. Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat pada tahun 2015 kebutuhan konsumsi dalam negeri mencapai 1.6 juta barel per hari sedangkan produksi hanya mencapai 834 ribu barel per hari.² Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri salah satu yang bisa dilakukan adalah impor minyak.

Penurunan produksi BBM yang terus turun menyebabkan pembengkakan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan peningkatan anggaran subsidi BBM dari tahun 2007 Rp. 61,838 triliun dan 2014 menjadi Rp 274,743 triliun untuk subsidi BBM. Jika dilibatkan untuk subsidi non migas maka total subsidi

² *Konsumsi BBM Indonesia 2016*, skk.migas.go.id diakses pada 13 Februari 2018 jam 23.48.

menjadi Rp 317,219 triliun Rupiah pada tahun 2014 subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah.³



Sumber: Diolah berdasarkan data BPS, BI, Kemenkue, dan Bappenas.

Gambar 1.2.
Perkembangan APBN dan Kondisi Surplus/Defisit 2005 s/d 2013

Pengeluaran subsidi sektor BBM yang terus meningkat mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan baru. Di akhir tahun 2014 lebih tepatnya 31 Desember 2014 Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah tentang subsidi BBM. Melalui Peraturan Pemerintah No. 191/2014⁴ tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran. Dalam aturan ini pemerintah menetapkan BBM menjadi tiga kategori yaitu: (1) solar dan minyak tanah masuk dalam BBM tertentu dan masih mendapatkan subsidi sebesar Rp 1000. (2) premium untuk wilayah Jawa

³ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007-2014, <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1178/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-miliar-rupiah-2007-2015.html> diakses pada 14 Desember 2017 jam 23:00

⁴ Peraturan Pemerintah No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). jdih.esdm.go.id diakses pada 14 Desember 2017 jam : 22.05

dan Bali masuk dalam BBM khusus. (3) premium untuk luar Jawa dan Bali serta jenis lain, seperti Pertamina, masuk kategori BBM umum.

Ditetapkan subsidi tetap dan penyerahan pada mekanisme pasar oleh pemerintah menimbulkan gejala baru terhadap harga BBM. Harga BBM akan terus mengalami fluktuasi mengikuti harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Hal ini memberikan dampak yang negatif dalam kebijakan fiskal negara. Kritik terhadap kebijakan pemerintah yang menghapuskan subsidi dan menyerahkan sistem harga kepada mekanisme pasar, disampaikan oleh seorang ekonom dari Internasional Business School (IPMI), bernama Jimmy M Rifai Gani, menurutnya penyerahan harga minyak kepada mekanisme pasar menyebabkan harga-harga akan cenderung mengalami fluktuatif.⁵

Penyerahan harga pada mekanisme pasar banyak menimbulkan pro dan kontra sekarang ini mengingat semakin kompleksnya ekonomi di masa ini. John Maynard Keynes dalam teorinya, ia mengemukakan bahwa perekonomian tidak begitu saja diserahkan kepada mekanisme pasar, namun diperlukan turut serta peran pemerintah dalam mengatasi perekonomian suatu negara.⁶ Sebelum Keynes mengemukakan pendapatnya, ilmuan sebelum Keynes sudah lebih dulu meletakkan pondasi

⁵ *Mekanisme Pasar Kuasai Ekonomi RI*. Perpustakaan Bappenas. <http://bappenas.go.id>. diakses 02 Januari 2018 jam 23.00.

⁶ Hendra Eka Putra.2016. “*Pengaruh Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar Rupiah, Pengeluaran Pemerintah, dan Ekpor Netto terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1985-2014*”.skripsi Fak Ekonomi dan Bisnis. UNAIR.repository.uniar.ac.id.

dasar awal teori tersebut. Pada era Skolastik Thomas Aquinas dengan teorinya yang menekankan pada *just price*. Teori yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas berdasarkan pada pandangan Filsuf Yunani yaitu Aristoteles.⁷

Thomas Aquinas mengikuti kata demi kata apa yang dikatakan oleh Aristoteles. Albertus Maqnus memasukkan analisis biaya tenaga kerja ke dalam pembahasan mekanisme pasar, dengan perbaikan dan penyempurnaan, Aquinas meneruskannya. Sama seperti Aquinas, ilmuwan Muslim yang termashur yaitu Ibnu Taimiyah juga membahas terkait mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah banyak mengenal pemikiran-pemikiran Aristoteles, akan tetapi beliau tidak seperti Aquinas yang menganggap Aristoteles sebagai guru yang universal. Ibnu Taimiyah berfikir bahwa Aristoteles salah jalur atau keluar jalur dan mengkritik Aristoteles dalam tulisannya, serta menolak untuk mengikuti pemikiran Aristoteles.⁸

Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah dan Aquinas sebenarnya tidak jauh berbeda hanya Aquinas lebih menekankan pada sisi nilai subjektif dari objek sisi penjual sementara Ibnu Taimiyah mempertimbangkan juga dari nilai subjektif dan objektif dari sisi pembeli sehingga menjadikan analisisnya lebih baik dari Aquinas.⁹ Dalam buku Ibnu Taimiyah yang

⁷ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. Cetakan ke 5 Jakarta:Raja Grafindo persada. 2015. Hal.169.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*,hal.167

berjudul *Al-Hisbah fi Al-Islam dan Majmu' Fatawa* yang kemudian disebut sebagai *the beauty of market* mengatakan bahwa mekanisme pasar ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Fokus pemikiran Ibnu Taimiyah lebih mengarah pada pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran apabila penduduk menjual barang secara normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (berkurangnya *supply*) atau dikarenakan jumlah penduduk (meningkatnya *demand*) memaksa menjual pada harga tertentu adalah sebuah pelanggaran.¹⁰

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar. Hal ini menggambarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau menggambarkan bahwa ketika tidak ada hal-hal yang melanggar hukum, seperti berbentuk penimbunan dan hal-hal yang tidak adil yang lain, maka kenaikan harga dianggap wajar saja. Sama seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika mendesak pasar dalam keadaan harga naik, tetapi bukan karena hal-hal yang tidak adil maka Rasulullah SAW menolak untuk mengeluarkan kebijakan menurunkan harga. Seringkali Rasulullah melakukan inspeksi dan menemukan banyak sekali pelanggaran, maka Rasulullah menegur hal tersebut.¹¹ Hal ini juga

¹⁰ Euis Amalia, *Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal : Al-Iqtishad. 2013. Vol. V, No. 1. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹¹ Ibid., hal. 169

diikuti oleh Ibnu Taimiyah dalam menganalisa pemikirannya tentang mekanisme pasar.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk membahas mekanisme pasar BBM di Indonesia berdasarkan perspektif Ibnu Taimiyah. Alasan peneliti memilih pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai rujukan, karena Ibnu Taimiyah adalah salah satu peletak dasar teori mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah menjelaskan teori mekanisme pasar secara mendalam dan komperhensif sehingga sesuai dengan permasalahan yang ada sekarang ini terutama terkait dengan pasar BBM di Indonesia. Dalam pembahasan mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah melibatkan banyak hal untuk menganalisa permasalahan di atas yaitu, harga yang adil, keuntungan yang setara, mekanisme pasar dan peran negara. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas **“PANDANGAN ISLAM TERHADAP HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI INDONESIA (PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH)”**.

B. Rumusan Masalah.

Sesuai dengan apa yang dirumuskan di atas, dalam skripsi ini peneliti ingin mengungkapkan bagaimana pandangan Islam terhadap penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dalam perspektif Ibnu Taimiyah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Hasil yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana pandangan Islam terkait mekanisme pasar terkhusus pada perspektif Ibnu Taimiyah studi kasus pasar BBM di Indonesia dikaitkan dengan teori mekanisme pasar Ibnu Taimiyah sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa teori ilmuan Muslim masih sangat relevan digunakan hingga sekarang ini

b. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khazanah keilmuan bagi kita semua. Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat membuktikan bahwa ilmuan Muslim memiliki peranan penting terhadap kegiatan ekonomi manusia dan masih sangat relevan digunakan hingga sekarang ini. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi kajian sehingga dapat diteruskan kemudian hari.

D. Kegunaan Penelitian.

a. Secara teoritis

1. Memberikan peran pengembangan keilmuan dalam hal mekanisme pasar menurut Islam secara mendalam, terkhususkan

pada pengambilan kebijakan pada sektor Bahan Bakar Minyak (BBM).

2. Memberikan kontribusi bagi ahli pengembang pemikiran ekonom muslim untuk dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ekonomi Islam.
 3. Mengetahui gambaran secara umum bagaimana kebijakan Pemerintah terkait BBM dan bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.
- b. Secara praktisi
- a) Bagi penulis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis dalam hal melakukan pengungkapan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam teori mekanisme pasar dan kemudian dikomparasikan dengan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah.

- b) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah untuk menerapkan kebijakan Pasar BBM di Indonesia. Selain itu bagi para praktisi bisa menjadi kajian yang lebih mendalam, tentang bagaimana masih sangat relevan dan sangat baik diterapkan dalam perekonomian Indonesia.